

***TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT DJITOE INDONESIAN
TOBACCO COY SOLO DENGAN PEKERJA DALAM MELAKUKAN
PEKERJAAN DENGAN SISTEM KONTRAK***



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:
INGGARIS LUTFIANDRE
C100160189**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAM MADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT DJITOE INDONESIAN
TOBACCO COY SOLO DENGAN PEKERJA DALAM MELAKUKAN
PEKERJAAN DENGAN SISTEM KONTRAK**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

INGGARIS LUTFIANDRE

C100160189

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written over a faint, irregular rectangular outline.

(NUSWARDHANI, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT DJITOE INDONESIAN
TOBACCO COY SOLO DENGAN PEKERJA DALAM MELAKUKAN
PEKERJAAN DENGAN SISTEM KONTRAK

Oleh:

INGGARIS LUTFIANDRE

C100160189


Telah diterima dan disahkan di Depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 16 Mei 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

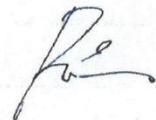
1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)


()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.
NIDN.07270858803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Mei 2020

Penulis



INGGARIS LUTFIANDRE

C100160189

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT DJITOE INDONESIAN TOBACCO COY SOLO DENGAN PEKERJA DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN SISTEM KONTRAK

Abstrak

Dalam melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak menimbulkan adanya hubungan hukum antara pihak penerima kerja/pekerja dengan pihak pemberi kerja/pengusaha yang dalam hal ini adalah PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo. Guna memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha maka terdapat ketentuan-ketentuan yang dicantumkan di perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati bersama tersebut yang berupa hak dan kewajiban yang wajib untuk dipenuhi dan terpenuhi bagi kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Kontrak antara PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo, hak dan kewajiban bagi pekerja dan juga pengusaha/PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo yang timbul karena diadakannya Perjanjian Kerja Kontrak, serta penyelesaian perselisihan dan tanggung jawab hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Normatif, karena dalam penelitian ini meneliti mengenai aspek hukum, aturan hukum, yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara perusahaan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan kontrak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tanggung jawab hukum antara PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan sistem kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya kesepakatan antara pekerja dengan PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo, pekerja diwajibkan untuk melengkapi syarat administrasi dan syarat hukum yang berlaku setelah itu juga diwajibkan mengikuti test interview dan masa training selama 3 bulan. Setelah dinyatakan lulus serangkaian test selanjutnya pekerja akan dihadapkan surat perjanjian kontrak kerja yang dibuat pihak PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo untuk selanjutnya disepakati dan ditandatangani bersama dengan PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo. Dengan disepakatinya perjanjian kerja waktu tertentu oleh kedua belah pihak maka kemudian terjadilah hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal pelaksanaannya apabila terjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban maka dapat dimintakan pertanggung jawaban kerugian atas dasar wanprestasi pasal 1243 KUHPerdara. Kemudian apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum pada saat pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu ini, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dasar perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdara. Dalam hal terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut dapat dilakukan penyelesaain dengan upaya alternatif/musyawarah terlebih dahulu namun bila tidak membuahkan hasil dapat dilakukan upaya dengan mengajukan permohonan ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial berdasarkan wanprestasi (pasal 1243 KUHPerdara) atau perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara).

Kata kunci : perjanjian kerja waktu tertentu, hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum.

Abstract

In carrying out work with the contract system, there is a legal relationship between the recipient of the work / worker and the employer / entrepreneur, in this case PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo. In order to provide legal protection for workers and employers, there are provisions contained in certain agreed upon time work agreements in the form of rights and obligations that must be fulfilled and fulfilled for both parties. This study aims to determine how the mechanism of implementing a Specific Time Work Agreement (PKWT) or Contract Work Agreement between PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo, rights and obligations for workers and employers / PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo arising from the holding of a Contract Work Agreement, and Settlement of disputes and legal responsibilities. This study uses a Normative legal approach, because in this study examines aspects of the law, the rule of law, relating to legal responsibilities between companies and workers in carrying out contract work. This type of research is descriptive research which is to provide a clear and comprehensive picture of the legal responsibilities between PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo and workers in carrying out contract system work. The results showed that prior to an agreement between the employee and PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo, workers were required to complete administrative requirements and applicable legal requirements after that were also required to take a test interview and a training period of 3 months. After passing a series of tests it is stated that workers will be confronted with an employment contract made by PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo for further agreement and signed with PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo. With the agreement of a certain time work agreement agreed by both parties then a legal relationship will occur which gives rise to the rights and obligations that must be carried out and fulfilled by both parties by observing the provisions of the applicable law. In the case of implementation if an error occurs which results in the fulfillment of rights and obligations, the loss liability on the basis of article 1243 of the Civil Code can be held. Then if one of the parties commits an act that violates the rule of law at the time of the implementation of the work agreement for a certain period of time, then liability can be held on the basis of acts against the law article 1365 of the Civil Code. In the case of these errors, resolutions can be done with alternative efforts / deliberations beforehand, but if they do not produce results, efforts can be made by submitting a request to BANI (Indonesian National Arbitration Board) or filing a lawsuit to the industrial relations court based on breach of contract (article 1243 of the Civil Code) or acts against the law (article 1365 of the Civil Code).

Keyword: specific time work agreements, rights and obligations, legal responsibilities.

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dengan persaingan bisnis yang semakin ketat seperti sekarang ini, perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja usaha produksinya melalui pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga biaya pengeluaran dapat ditekan dan keuntungan menjadi meningkat. Salah satu upaya untuk menekan pengeluaran dalam rangka melakukan usaha produksinya yaitu dengan memperkerjakan pekerja dengan sistem kontrak. Dengan memperkerjakan pekerja dengan sistem kontrak ini perusahaan

tentunya tidak diwajibkan memberikan fasilitas-fasilitas seperti pekerja tetap sehingga pengeluaran perusahaan menjadi lebih sedikit. Dalam hal memperkerjakan pekerja dengan sistem kontrak ini pekerja diikat dengan suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau umumnya dikenal juga dengan perjanjian kerja kontrak yang merupakan suatu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu yang bersifat sementara. Dalam hal ini perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara sepihak oleh perusahaan yang dalam hal ini adalah PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo selaku pemberi kerja dan selanjutnya akan disepakati dan ditandatangani bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dengan menyepakati perjanjian kerja waktu tertentu tersebut mengakibatkan adanya suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pekerja dan pengusaha/perusaha yang dalam hal ini adalah PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo. Apabila salah satu pihak baik pekerja maupun pengusaha/perusahaan yang dalam hal ini adalah PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo melakukan suatu kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi seperti melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati, tidak melakukan atau melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan ataupun terbukti melakukan suatu kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dengan begitu selanjutnya akan menimbulkan adanya tanggung jawab hukum dimana pihak yang telah melakukan kesalahan diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan yang dilakukannya tersebut.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah antara lain 1) bagaimana proses perjanjian kerja antara PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo dengan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan kontrak, 2) bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo dengan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan kontrak, 3) bagaimana penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan antara PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan kontrak dan bagaimana pertanggung jawaban hukumnya.

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai antara lain adalah 1) untuk mengetahui proses berlangsungnya perjanjian kerja antara PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan kontrak, 2) untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban yang muncul diantara PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan kontrak, 3) untuk mengetahui penyelesaian perselisihan yang dilakukan bilamana terjadi perselisihan antara PT Djitoe Indonesian Tobacco coy

Solo dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan kontrak serta pertanggung jawaban hukumnya. Adapun manfaat terhadap penelitian ini berupa 1) bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai ilmu hukum beserta penerapannya dalam masyarakat khususnya hukum ketenagakerjaan dalam hal perjanjian kerja kontrak. Dengan ini juga dapat dijadikan sebagai bekal bagi penulis dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ketenagakerjaan ketika terjun di dalam dunia kerja kelak, 2) bagi ilmu hukum dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan pemikiran dan solusi dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perjanjian kerja kontrak, 3) bagi masyarakat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dan juga diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perjanjian kerja kontrak.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan normatif. Bahwa penelitian ini meneliti mengenai aspek hukum yaitu aturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara perusahaan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan kontrak.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tanggung jawab hukum antara PT Djitoe Indonesian Tobacco coy Solo dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan sistem kontrak.

Jenis dan data penelitian diperoleh dari a) penelitian kepustakaan yang dilakukan agar memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan yaitu bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, kemudian bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah para sarjana atau pendapat para sarjana yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum perusahaan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan kontrak, kemudian terdapat pula bahan hukum tersier yang

diperoleh dari kamus hukum dan bahan pustaka lainnya. kemudian b) penelitian lapangan dimana penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan di PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo yang terletak di Jalan L U. Adisucipto No 1, Kerten, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan subjek penelitiannya adalah Staf di bagian Personalia PT Djitoe Coy Solo.

Kemudian metode pengumpulan data meliputi: studi kepustakaan, penelitian lapangan berupa wawancara. Selanjutnya metode analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perjanjian Kerja Antara PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo Dengan Pekerja Dalam Melaksanakan Pekerjaan Dengan Sistem Kontrak.

Sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian kerja antara PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo dengan pekerja, terlebih dahulu harus memenuhi kelengkapan syarat administrasi dan syarat hukum yang telah ditentukan Pengusaha/Perusahaan yang dalam hal ini adalah PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo yaitu: 1) Surat Lamaran, 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, 3) Fotocopy Daftar Riwayat Hidup, 4) Fotocopy Ijazah Pendidikan Terakhir, 5) Pas Photo Ukuran 3x4.

Kemudian adapun persyaratan lainnya yaitu keharusan untuk memenuhi syarat hukum yang dijadikan pedoman dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau yang umumnya dikenal dengan perjanjian kerja kontrak yang dimana syarat-syarat hukum tersebut tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni: a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, b) kemampuan atau kecakapan bagi pihak untuk melakukan perbuatan hukum, c) ada pekerjaan tertentu yang diperjanjikan, d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terpenuhinya syarat administrasi maupun syarat hukum selanjutnya pekerja diwajibkan mengikuti beberapa serangkaian test berupa tahap test interview dan bila lolos akan dilanjutkan dengan tahap uji coba kerja/ training selama 3 bulan dengan tetap menerima gaji sesuai besaran Upah Minimum Regional (UMR) Kota Surakarta. Kemudian setelah pekerja berhasil menempuh tahapan training selama 3 bulan maka pihak PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo selaku pemberi kerja akan memberikan surat

perjanjian kontrak kerja dalam bentuk tertulis sebanyak rangkap dua yang telah dibuat oleh PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo untuk disepakati dan ditandatangani bersama oleh pekerja dan juga pihak PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo. Setelah surat perjanjian kontrak kerja tersebut telah disepakati dan ditangani pula maka para pihak telah terikat pada ketentuan-ketentuan dalam suratperjanjian kontrak kerja tersebut sehingga muncul hubungan hukum antara pekerja dengan PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo dengan adanya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

3.2 Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Antara PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo Dengan Pekerja Dalam Melaksanakan Pekerjaan Dengan Sistem Kontrak.

Terjadinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau yang dikenal dengan perjanjian kerja kontrak harus memuat syarat sahnya perjanjian kerja yang tercantum dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan antara lain: a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, b) kemampuan atau kecakapan bagi pihak untuk melakukan perbuatan hukum, c) ada pekerjaan tertentu yang diperjanjikan, d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaanya, perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja kontrak harus mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pihak pekerja dan pengusaha yang dalam hal ini adalah PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo. Dengan adanya kesepakatan diantara para pihak yang merupakan subjek hukum yang melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut maka terjadi pula hubungan hukum yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang telah dibuat oleh PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo tersebut.

Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya adapun kewajiban dari pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo antara lain: 1) berkewajiban memberikan gaji kepada pekerja sebesar Rp 60.200,- per hari yang akan diberikan setiap hari sabtu, 2) berkewajiban memberikan fasilitas dan kesejahteraan berupa mendaftarkan pekerja sebagai anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian hak dari pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo antara lain: 1) berhak menentukan penempatan bagian kerja kepada pekerja, 2) berhak memberikan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja apabila pekerja melakukan

pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, adanya ketidak cocokan antara pekerja dengan pihak pengusaha, apabila adanya penurunan jumlah produksi kemudian pemutusan hubungan kerja ini sah dilakukan meskipun masa kontraknya belum habis, 3)berhak melakukan perpanjangan masa kontrak kepada pekerja bilamana kedua belah pihak setuju.

Kemudian pekerja juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan antara lain: 1) berkewajiban melakukan pekerjaan sesuai dengan bagian kerja yang telah ditetapkan oleh pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo selama masa kontrak 1 tahun, 2) berkewajiban melakukan pekerjaan dengan ketentuan waktu kerja yaitu 7 jam dalam sehari dan 6 hari kerja dalam seminggu, 3) berkewajiban mentaati segala peraturan maupun petunjuk yang ada dan berlaku di PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo.

Adapun hak pekerja antara lain: 1) berhak memperoleh gaji sebesar Rp 60.200,- per harinya yang akan diberikan setiap hari sabtu, 2) berhak memperoleh fasilitas dan kesejahteraan sesuai aturan yang berlaku.

3.3 Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Perselisihan Antara PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo Dengan Pekerja Serta Tanggung Jawab Hukumnya Dalam Melaksanakan Pekerjaan Sistem Kontrak.

3.3.1 Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Perselisihan Antara PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo Dengan Pekerja.

Dalam hal adanya suatu perselisihan yang terjadi diantara pekerja dengan Pengusaha yang dalam hal ini adalah PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo dengan pekerja terdapat beberapa upaya yang ditempuh antara lain penyelesaian secara bipartit/musyawarah secara bipartit, mediasi, konsiliasi, dan yang terakhir melalui jalur litigasi yaitu melalui arbitrase atau melalui peradilan hubungan industrial.

Dalam penyelesaiannya, terlebih dahulu diutamakan dengan upaya melalui musyawarah secara bipartit yaitu musyawarah yang dilakukan oleh pihak pekerja dengan pengusaha seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Apabila upaya musyawarah bipartit gagal maka dapat menempuh upaya selanjutnya yang melibatkan pihak ketiga yang mampu membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yaitu dengan upaya mediasi ataupun konsiliasi yang dimana dalam hal kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih upaya penyelesaian melalui mediasi ataupun konsiliasi tersebut. Kemudian bilamana upaya mediasi ataupun konsiliasi belum juga mencapai kesepakatan maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan ke BANI (Badan

Arbitrase Nasional Indonesia) untuk diselesaikan melalui arbitrase ataupun dapat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri setempat untuk diselesaikan dengan mekanisme peradilan hubungan industrial. Dengan upaya secara litigasi ini diharapkan mendapat putusan dari hakim arbitrase (arbiter) ataupun majelis hakim pengadilan hubungan industrial sehingga dapat terselesaikannya perselisihan yang terjadi.

Pada praktiknya PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo dalam rangka menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan dengan upaya musyawarah secara bipartit yang tentunya melibatkan pihak pekerja dan juga pihak pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo. Selama ini dengan upaya penyelesaian melalui musyawarah bipartit antara pekerja dengan PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo selalu dapat terselesaikan dan mencapai kesepakatan. Musyawarah secara bipartit ini juga dianggap sebagai upaya penyelesaian yang lebih efektif dan menghasilkan suatu keputusan yang berdasarkan kesepakatan bersama.

3.3.2 Tanggung Jawab Hukum Bila Terjadi Sengketa Antara PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo Dengan Pekerja.

Suatu perselisihan yang muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan sehingga selanjutnya timbul adanya pertanggungjawaban hukum. Adanya kesalahan baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum tentunya mengakibatkan timbulnya pertanggung jawaban hukum yang wajib dilaksanakan bagi pihak yang telah terbukti melakukan kesalahan tersebut.

Kemudian adapun kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja misalnya datang terlambat, tidak hadir tanpa keterangan/bolos, jumlah absensi tidak sesuai kesepakatan, ataupun tidak melakukan kewajiban yang di sepakati dalam surat perjanjian kontrak kerja maka atas dasar kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi tersebut, pekerja dapat dimintai pertanggung jawaban hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1243 KUHPerdara. Sebaliknya bilamana pengusaha melakukan kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi seperti tidak memberikan gaji sesuai yang diperjanjikan, tidak memberikan upah lembur, dan sebagainya maka berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara pihak pengusaha dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum. Kemudian akibat adanya kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi baik yang dilakukan oleh pekerja ataupun pengusaha dalam hal ini PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo maka apabila tidak dapat terselesaikan dengan musyawarah, mediasi ataupun konsiliasi maka

pihak yang merasa dirugikan baik pekerja ataupun pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan hubungan industrial.

Selanjutnya adapun kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja misalnya melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku di PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo atau melakukan tindakan pencurian, penipuan dan sebagainya yang merugikan pengusaha dan juga adapun kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha seperti memberikan gaji tidak sesuai dengan ketentuan standar UMR yang berlaku, melakukan perbuatan kejahatan yang merugikan pekerja maka atas kesalahan yang didasarkan maka kepada pihak pekerja maupun pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo yang telah melakukan kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dengan adanya kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja ataupun pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo maka bagi pihak yang merasa dirugikan baik itu pihak pekerja maupun pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan hubungan industrial dan selanjutnya pihak yang telah terbukti melakukan kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pada prosesnya awalnya pekerja diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo berupa syarat administrasi dan syarat hukum. Setelah semua syarat dipenuhi pekerja selanjutnya mengikuti tahap test yang telah ditentukan yaitu tahap test interview dan tahap uji coba kerja/ training. Setelah pekerja telah dinyatakan lulus serangkaian tahapan test tersebut maka selanjutnya pekerja akan dihadapkan pada surat perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat oleh PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo untuk disepakati dan ditanda tangani bersama oleh pihak pekerja selaku penerima kerja dan PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo selaku pengusaha atau pemberi kerja.

Kedua, baik pihak pekerja maupun pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo keduanya merupakan subjek hukum yang telah mengadakan perjanjian. Kemudian adanya kesepakatan antara pekerja dan PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo memunculkan adanya hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pekerja maupun PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo. Kewajiban yang harus dijalankan oleh pekerja tersebut merupakan suatu hak bagi pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu apabila suatu kewajiban tidak dijalankan baik oleh pekerja maupun oleh pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo maka secara otomatis akan muncul pertanggung jawaban hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Ketiga, perselisihan terjadi dikarenakan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang terikat didalam perjanjian yangtelah disepakati bersama. Kemudian mengenai perselisihan yang muncul diantara pekerja dengan pengusaha yang dalam hal ini adalah PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo dapat diselesaikan dengan beberapa upaya antara yaitu musyawarah secara bipartit, mediasi, konsiliasi kemudian melalui jalur litigasi yaitu arbitrase ataupun melalui peradilan hubungan industrial. Namun wajib terlebih dahulu untuk diupayakan melalui musyawarah secara bipartit (berdasar pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun apabila musyawarah secara bipartit gagal maka dapat melalui upaya mediasi ataupun konsiliasi. Apabila upaya nonlitigasi tersebut belum bisa mencapai kesepakatan atau dapat dikatakan gagal maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) untuk diselesaikan melalui sidang arbitrase ataupun dapat pula mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri setempat untuk diselesaikan melalui persidangan peradilan hubungan industrial.

Mengenai kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pekerja ataupun oleh pihak pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo maka berdasarkan pasal 1243 KUHPdata bagi pihak yang merasa dirugikan baik pihak pekerja maupun pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan hubungan industrial bilamana upaya nonlitigasi tidak membuahkan hasil dan selanjutnya pihak yang terbukti melakukan kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Kemudian apabila terdapat kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh pekerja maupun pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo maka berdasarkan pasal 1365 KUHPdata bagi pihak yang merasa dirugikan baik pihak pekerja ataupun pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan hubungan industrial dan bagi pihak yang telah terbukti melakukan kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut.

4.2 Saran

4.2.1 Bagi Pengusaha/Perusahaan

Dalam hal surat perjanjian kontrak kerja yang dibuat oleh Pengusaha/PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo seharusnya mencantumkan besaran upah/gaji lembur yang diberikan kepada pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditentukan. Kemudian pihak pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo seharusnya juga memberikan ketentuan ganti rugi bagi pekerja yang dengan sengaja dan tanpa sebab berhenti bekerja sebelum masa kontrak yang diperjanjikan selesai. Hal tersebut perlu diberlakukan agar terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan.

4.2.2 Bagi Pekerja/Buruh

Bahwa dalam hal ini pekerja/buruh yang akan melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu/ perjanjian kerja kontrak, perlu memahami dan membaca terlebih dahulu isi dan ketentuan secara keseluruhan surat perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat oleh pihak pengusaha/ PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo yang dalam hal ini merupakan pedoman didalam melaksanakan perjanjian kerja kontrak tersebut. Karena apabila pekerja telah menyepakati surat perjanjian kontrak kerja tersebut maka pekerja harus melaksanakan isi dari perjanjian kontrak kerja tersebut yang meliputi ketentuan serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi karena pekerja telah menyepakatinya serta pekerja harus melaksanakan pekerjaan yang telah disepakatinya tersebut.

Selanjutnya perlu diketahui juga bilamana pekerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam surat perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat oleh PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy Solo atau melakukan kewajiban namun tidak sesuai yang diperjanjikan kemudian dapat pula bilamana pekerja melanggar ketentuan dan aturan perusahaan yang ada maka karena kesalahan atas dasar wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tersebut dapat mendatangkan kewajiban pagi

pekerja untuk mengganti kerugian oleh sebab itu pekerja/buruh harus berhati-hati dan harus tertib dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakatinya tersebut.

4.2.3 Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum yang ingin melakukan perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu/perjanjian kerja kontrak sebaiknya terlebih dahulu mencari informasi mengenai bidang kerja yang ditawarkan oleh pihak pengusaha dan juga perlu terlebih dahulu mengetahui mekanisme proses perjanjian kerja waktu tertentu agar ketika melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu tidak ada keterpaksaan serta kesalahan yang justru dapat mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Joni R. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung:CV Pustaka Setia.
- Halim Ridwan A. 1983. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:Intermesa
- Saebani Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Ali Zanuiddin. 2016.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.